

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses manusia saat beralih keseimbangannya dari tingkat kualitas yang dinilai belum maksimal terhadap keseimbangan baru di tingkat kualitas yang dianggapnya lebih tinggi merupakan sebuah implikasi adanya pembangunan. Tujuan pembangunan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Lestari dkk., 2021) terhadap negara berkembang termasuk Negara Indonesia, fokus untuk pembangunan dengan lebih memperhatikan antara pemerataan dan pertumbuhan yaitu pertumbuhan ekonomi.

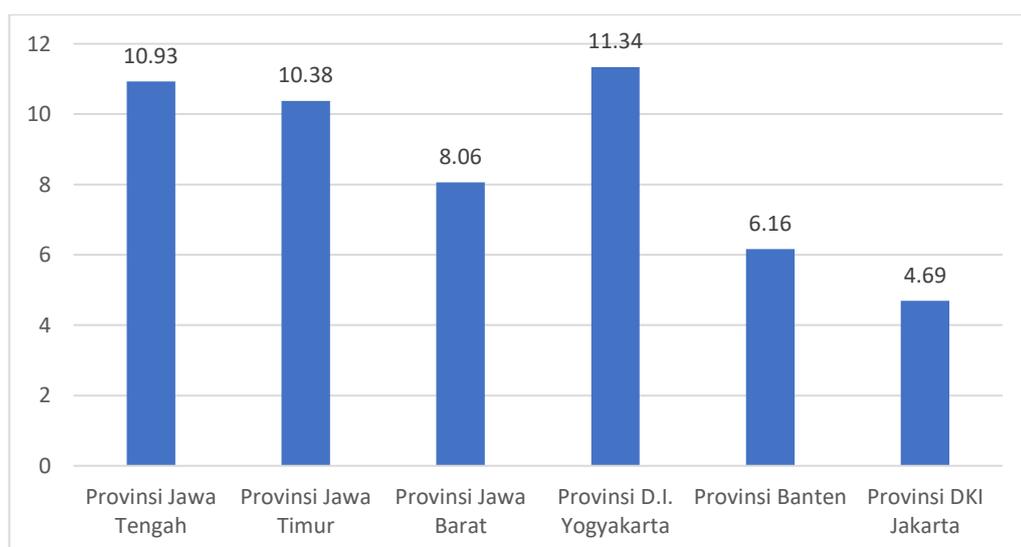
Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan sosial ekonomi kerap terjadi di suatu daerah. Kemiskinan yakni keterbatasan seseorang dalam hal melengkapi kebutuhan tiap harinya hingga taraf manusiawi. Salah satu pemicu terjadinya kemiskinan yakni penurunan kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas upah yang didapatkannya juga akan semakin kecil. Kasus mengenai kemiskinan ini dianggap menjadi salah satu permasalahan pada pembangunan ekonomi. Tujuan dari adanya pembangunan ekonomi yaitu pengentasan kemiskinan, menumbuhkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan dengan optimal, memperluas kesempatan bagi tenaga kerja, serta meningkatkan taraf hidup bagi seluruh masyarakat. Pencapaian tujuan pembangunan secara menyeluruh dibutuhkan kenaikan pertumbuhan ekonomi serta distribusi terkait penghasilan yang merata (Purnama, 2017).

Menurut Bappenas (2022), kemiskinan yakni sebuah keterbatasan untuk mencukupi kebutuhan pokok yaitu makanan dan non-makanan yang berhubungan

dengan pengeluaran. Untuk dapat diketahui batasan pemenuhan kebutuhan dasar ini bisa diukur dalam satuan rupiah dan dapat dikenali dengan sebutan garis kemiskinan. Penduduk miskin yakni seseorang yang mempunyai rata-rata pengeluaran perkapitanya dalam perbulan ini berada di bawah garis kemiskinan.

Mengatasi kemiskiskinan di suatu daerah perlu diketahui faktor yang dapat memengaruhi kemiskinan dengan keseluruhan penduduk miskin yang berada di wilayah tersebut. Oleh sebab itu dapat menjadi pertimbangan dalam kebijakan penanganan jumlah penduduk miskin. Wilayah Eks Karesidenan Banyumas berada di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah dengan mayoritas penduduk bekerja pada sektor pertanian (Wijaya dkk., 2020). Pada sektor pertanian dengan jumlah tenaga kerja semakin menurun dan kualitas pendidikan memprihatinkan. Mayoritas tenaga kerja yang berada pada sektor pertanian didapati bahwa tingkat pendidikan tertingginya yaitu sekolah dasar, sehingga memiliki relevansi terhadap rata-rata lama sekolah pada wilayah Eks Karesidenan yaitu tujuh tahun.

Gambar 1. 1 Tingkat Kemiskinan di Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa, 2022 (Persen)

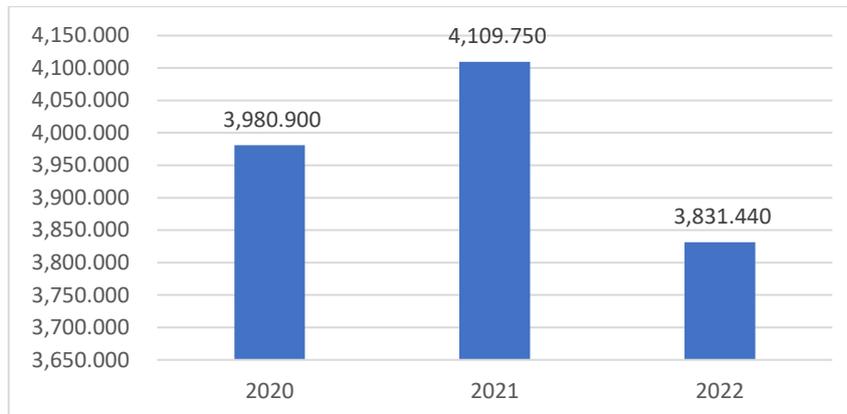


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (diolah)

Berdasarkan grafik 1.1, terdapat persentase penduduk miskin dari keseluruhan provinsi yang ada di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah yakni provinsi paling miskin kedua setelah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki persentase paling tinggi di Pulau Jawa sebesar 11,34%. Provinsi Jawa Timur menduduki tingkat kemiskinan ketiga dengan persentase sebesar 10,38%. Provinsi Jawa Barat dengan tingkat kemiskinan yang menunjukkan persentase sebesar 8,06%. Terdapat Provinsi Banten dengan tingkat kemiskinan sebesar 6,16%. Tingkat kemiskinan dengan persentase paling rendah di Pulau Jawa yaitu provinsi DKI Jakarta dengan nilai persentase sebesar 4,69%. Grafik tingkat kemiskinan yang berada di seluruh Pulau Jawa ini dapat diketahui salah satu permasalahan sosial ekonomi yaitu kemiskinan. Kemiskinan ditangani dengan upaya pemerintah setiap tahun masih butuh adanya evaluasi, dikarenakan tingkat kemiskinan masih menjadi permasalahan utama. Penanganan pengentasan kemiskinan diperlukan guna meningkatkan pembangunan ekonomi sebelum terjadi percepatan tingkat kemiskinan lebih lanjut.

Kemiskinan dapat menghambat kesejahteraan rakyat dengan hak seharusnya didapatkan. Penghambat kesejahteraan rakyat salah satunya yaitu rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Selain itu banyak faktor penghambat kesejahteraan rakyat sehingga dapat menimbulkan masalah rendah atau tingginya kemiskinan, yaitu seperti melonjaknya jumlah penduduk di suatu daerah, meningkatnya jumlah pengangguran, serta menurunnya tingkat kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah (Mustamin & Nurbayani, 2015).

Gambar 1. 2 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah, 2020-2022 (Juta Jiwa)



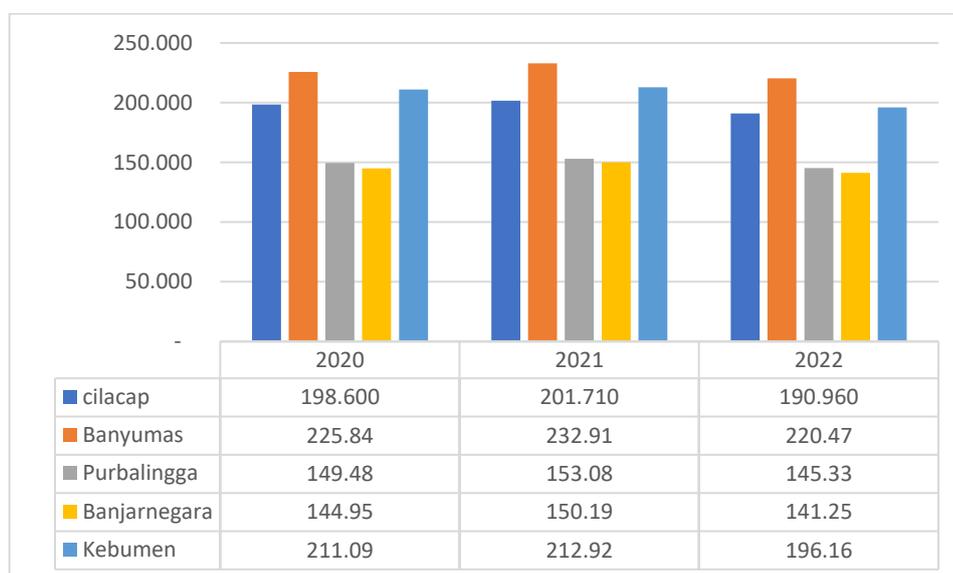
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023 (diolah)

Berdasarkan grafik 1.2 menunjukkan jumlah penduduk miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS) perkembangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk kemiskinan pada tahun 2020 hingga 2022. Menurut Badan Pusat Statistik, di tahun 2020 hingga 2022 dengan kemiskinan paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah yaitu pada tahun 2021 dengan nilai kemiskinan sebesar 4,109.750 jiwa dengan persentase 11,79%. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin 3,980.900 jiwa. Tahun 2022 mengalami penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,86% sehingga total penduduk miskin yang berada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 3.831.440 jiwa dengan persentase tingkat kemiskinannya sebesar 10,93%. Jumlah penduduk miskin pada grafik 1.2 menunjukkan kemiskinan belum signifikan menurun sehingga kemiskinan masih terbilang relatif tinggi.

Kemiskinan yang meningkat dapat disebabkan oleh tingginya angka pengangguran di suatu wilayah. Masyarakat menganggur akan memiliki pendapatan yang terus berkurang atau bisa saja tidak mempunyai pendapatan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya akan kurang. Jumlah pendapatan dapat berimbas pada suatu tingkat kemiskinan yang ada pada suatu

wilayah, namun tingkat pendidikan juga akan memberikan pengaruh terhadap kemampuan diri. Tingkat pendidikan rendah, menyebabkan pengembangan diri setiap individu juga akan terbatas, selain itu dapat mengakibatkan semakin sempitnya lapangan pekerjaan sehingga dapat membatasi kemampuan dalam memanfaatkan peluang (Bapedda Karesidenan Banyumas, 2019).

Gambar 1. 3 Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas, 2020-2022 (Jiwa)



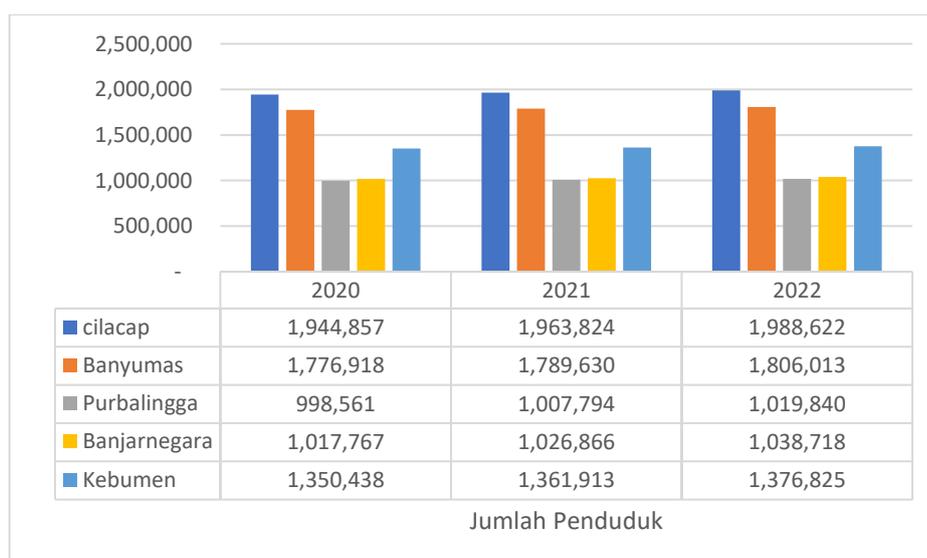
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023 (diolah)

Berdasarkan grafik 1.3 jumlah penduduk miskin di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas pada tahun 2020-2022, bisa diketahui pada Kabupaten Banyumas terdapat total akan penduduk miskin paling tinggi pada tahun 2020-2022 dibandingkan dengan wilayah yang berada di Karesidenan Banyumas (Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen). Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas mengalami fluktuasi, namun tidak mengalami penurunan signifikan. Penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 0.82% menjadi 220.470 ribu jiwa jumlah penduduk miskin. Kabupaten-Kabupaten di Wilayah Eks

Karesidenan Banyumas juga mengalami fluktuasi, namun penurunan dengan angka yang tidak beda jauh saat kenaikan jumlah penduduk miskin terjadi.

Faktor-faktor kemiskinan semakin meningkat akan semakin berpengaruh terhadap minimnya lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengakibatkan pengangguran semakin merangkak. Tingginya kasus permasalahan pengangguran akan juga semakin banyaknya jumlah pengangguran terjadi sehingga menghambat besarnya masyarakat miskin di wilayah tersebut termasuk pada ilayah Karesidenan Banyumas. Terserapnya tenaga kerja merupakan kondisi yang dapat menurunkan angka pengangguran. Pengangguran menurun dan tenaga kerja memadai dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta memberikan dampak terhadap pengurangan angka kemiskinan (Astuti dkk., 2018). Pengangguran masih menjadi permasalahan ekonomi, tingkat produktivitas dan pendapatan juga akan menurun sehingga mengakibatkan permasalahan sosial maupun permasalahan ekonomi lain muncul dan terjadi.

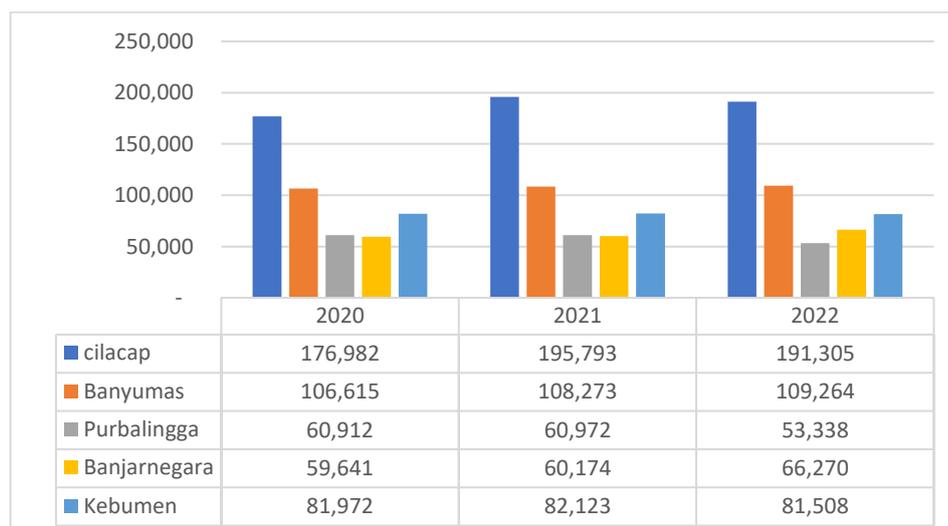
Gambar 1. 4 Jumlah Penduduk Wilayah Eks Karesidenan Banyumas, 2020-2022 (Jiwa)



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2023 (diolah)

Berdasarkan grafik 1.4 menunjukkan total dari penduduk Wilayah Eks Karesidenan Banyumas pada tahun 2020-2022. Kabupaten Cilacap menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk wilayah tertinggi dibandingkan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara. Dari tahun 2020-2022 Jumlah penduduk pada Kabupaten Cilacap terus meningkat hingga tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,9880,622. Jumlah penduduk pada kabupaten-kabupaten Wilayah Eks Karesidenan Banyumas mengalami kenaikan dalam kurun waktu tiga tahun dari 2020-2022. Jumlah penduduk dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan perlu dipastikan jika jumlah pekerjaan cukup tersedia untuk diperluas sejalan dengan pertumbuhan penduduk bertambah. Terdapat kemungkinan jika jumlah penduduk dapat mengakibatkan tingkat kemiskinan dan pengangguran berpengaruh terhadap jumlah penduduk.

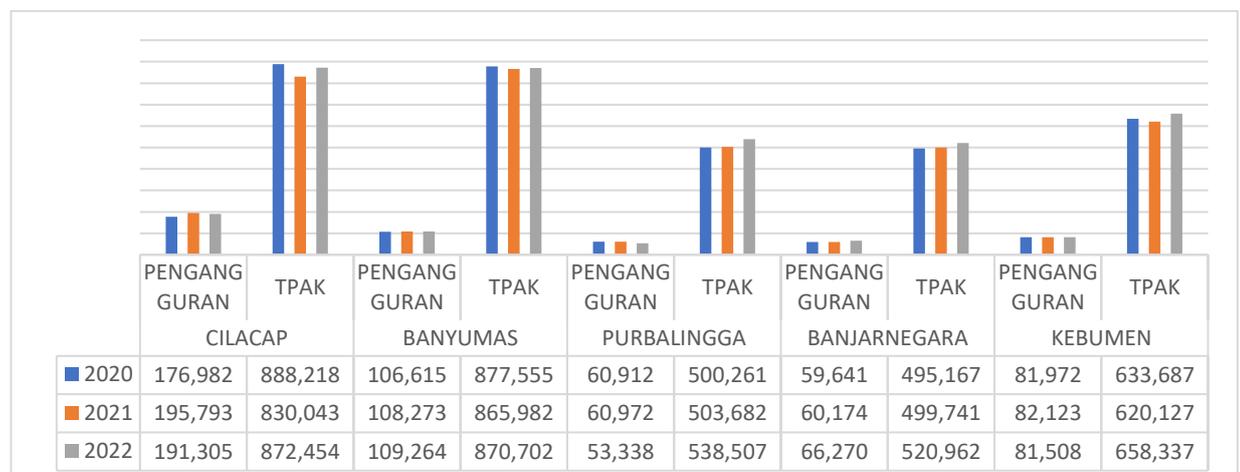
Gambar 1. 5 Pengangguran Wilayah Eks Karesidenan Banyumas, 2020-2022 (Jiwa)



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2023 (diolah)

Berdasarkan grafik 1.5 mengenai pengangguran di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas pada tahun 2020 - 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Cilacap menjadi kabupaten tertinggi pada jumlah pengangguran di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas. Kabupaten Cilacap juga menjadi kabupaten dengan populasi terbanyak dibandingkan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Banjarnegara. Jumlah pengangguran yang tinggi juga dapat disebabkan oleh jumlah penduduk pada suatu daerah dengan tidak diiringi perluasan lapangan pekerjaan, sehingga dapat juga meningkatkan kemiskinan. Tahun 2021-2022 Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Kebumen mengalami penurunan pada jumlah penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar 60,972 jiwa, tahun 2022 menurun hingga jumlah penduduk sebesar 53,338 jiwa. Pada Kabupaten Kebumen tahun 2021 jumlah penduduk sebesar 82,123 jiwa, turun pada tahun 2022 menjadi 81,508 jiwa. Penurunan jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas diiringi dengan menurunnya jumlah penduduk.

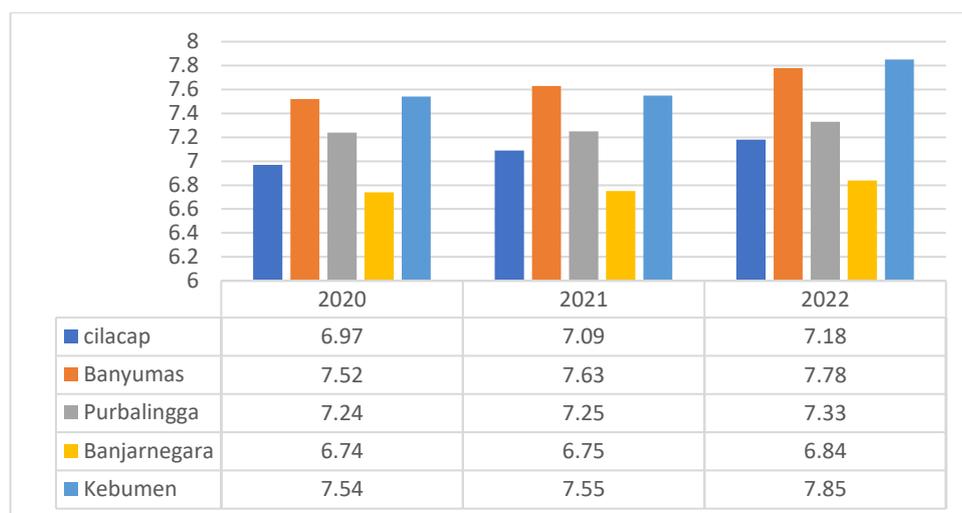
Gambar 1. 6 Pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas, 2020 – 2022 (Jiwa)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2023) diolah

Berdasarkan grafik 1.6 mengenai pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas pada tahun 2020 – 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Cilacap memiliki jumlah pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas. Permasalahan ekonomi seperti pengangguran memiliki banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Jumlah penduduk yang besar dan banyak masyarakat tidak aktif mencari pekerjaan juga dapat dipengaruhi oleh TPAK rendah, maka jumlah pengangguran juga akan terlihat rendah.

Gambar 1. 7 Rata-Rata Lama Sekolah Wilayah Eks Karesidenan Banyumas, 2020-2022 (Tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023 (diolah)

Berdasarkan grafik 1.6 menunjukkan jika rata-rata lama sekolah di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas tahun 2020-2022. Data terkait rata-rata lama sekolah menunjukkan jika Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten terendah dibandingkan dengan Wilayah Eks Karesidenan Banyumas. Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas memiliki peningkatan rata-rata lama sekolah dengan selang waktu tiga tahun 2020-2022.

Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen menjadi rata-rata lama sekolah paling tertinggi pada kurun waktu tiga tahun.

Pendidikan menjadi pendorong pembangunan untuk upaya meningkatkan kehidupan ekonomi. Pendidikan merupakan faktor kemiskinan dikarenakan pendidikan menjadi suatu model serta cara dalam meningkatkan kualitas termasuk meningkatkan sumber daya manusia.

Faktor jumlah penduduk, pengangguran, dan kemiskinan diasumsikan dapat memengaruhi kemiskinan pada sebuah negara. Faktor jumlah penduduk, pengangguran, dan pendidikan menjadi permasalahan yang dilalui oleh sebuah negara maju maupun negara berkembang. Peneliti ingin mengetahui dan mencari dampak dari jumlah pendidikan, penduduk, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas (Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen), pada penelitian sebelumnya dengan objek, waktu, serta lokasi yang berbeda. Maka dari itu, menurut tema pembahasan latar belakang ini, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pendidikan terhadap Kemiskinan di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas”**

1.2 Rumusan Masalah

Kemiskinan dapat memberikan pengaruh terhadap jumlah penduduk, pengangguran, serta pendidikan di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas. Berdasarkan hal tersebut, maka bisa diketahui masalah yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh pada kemiskinan di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas?
2. Apakah pengangguran berpengaruh pada kemiskinan di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas?
3. Apakah pendidikan berpengaruh pada kemiskinan di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas?
4. Apakah jumlah penduduk, pengangguran, serta pendidikan berpengaruh pada kemiskinan di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada latar belakang serta rumusan masalah yang sudah dipaparkan, bisa diketahui tujuan penelitian yakni :

1. Untuk menganalisis serta mengetahui pengaruh jumlah penduduk pada kemiskinan pada Wilayah Eks Karesidenan Banyumas.
2. Untuk menganalisis serta mengetahui pengaruh pengangguran pada kemiskinan pada Wilayah Eks Karesidenan Banyumas.
3. Untuk menganalisis serta mengetahui pengaruh pendidikan pada kemiskinan pada Wilayah Eks Karesidenan Banyumas.
4. Untuk menganalisis serta mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pengangguran dan pendidikan terhadap kemiskinan pada Wilayah Eks Karesidenan Banyumas

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian pada penelitian ini yakni penelitian kuantitatif. Penelitian ini memakai data sekunder yang didapati dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2013 hingga 2022 untuk menguraikan kasus kemiskinan

di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas (Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Kebumen). Penelitian menggunakan variabel yakni Jumlah penduduk, pengangguran serta pendidikan (*independent*) terhadap kemiskinan (*dependent*) sebagai alat ukur dengan memakai metode analisis regresi data panel, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini untuk kedepannya diharapkan bisa memberikan manfaat dalam memberikan referensi dalam hal pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, serta pendidikan terhadap kemiskinan di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas pada Tahun 2013 - 2022. Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini yakni :

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai referensi guna bermanfaat dalam memperluas wawasan mengenai variabel-variabel yang dibahas pada penelitian.

2. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini bisa menjadi informasi guna tindakan maupun kebijakan mengenai permasalahan yang dibahas pada penelitian, yaitu jumlah penduduk, pengangguran, serta pendidikan.